

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perkebunan yang menjadi sumber devisa bagi Indonesia adalah perkebunan Teh. Di Indonesia, perkebunan Teh diusahakan di daerah pegunungan, seperti di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Barat, perkebunan Teh terletak antara lain di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya (PEMDA TK. II Bandung:1995).

Teh dikenal di Indonesia sejak tahun 1686 ketika seorang Belanda bernama Dr. Andreas Cleyer membawanya ke Indonesia yang pada saat itu penggunaannya hanya sebagai tanaman hias. Baru pada tahun 1728, pemerintah Belanda mulai memperhatikan Teh dengan mendatangkan biji-biji Teh secara besar-besaran dari China untuk dibudidayakan di Pulau Jawa. Usaha tersebut tidak terlalu berhasil dan baru berhasil setelah pada tahun 1824 Dr. van Siebold seorang ahli bedah tentara Hindia Belanda yang pernah melakukan penelitian alam di Jepang mempromosikan usaha pembudidayaan dengan bibit Teh dari Jepang. Usaha perkebunan Teh pertama dipelopori oleh Jacobson pada tahun 1828 di Bogor dan sejak itu menjadi komoditas

yang menguntungkan pemerintah Hindia Belanda, sehingga pada masa pemerintahan Gubernur van Den Bosh, Teh menjadi salah satu tanaman yang harus ditanam rakyat melalui politik Tanam Paksa (*Culture Stetsel*). Pada masa kemerdekaan, usaha perkebunan dan perdagangan Teh diambil alih oleh pemerintah RI. Sekarang, perkebunan dan perdagangan Teh juga dilakukan oleh pihak swasta (ATI:2007).

Kabupaten Bandung sudah sejak lama memiliki daerah perkebunan besar yang mengusahakan tanaman yang dibutuhkan di pasaran internasional, diantaranya tanaman kina, kopi, Teh dan karet. Dalam pelaksanaan penguasaannya, perkebunan itu berada di tangan Perusahaan Negara, Swasta Nasional dan Swasta Asing. Dan ternyata Teh memiliki luas yang cukup dengan produksi yang cukup tinggi (Dinas Pertanian Kabupaten Bandung:2005).

Pengelolaan Teh pada pelaksanaannya ada yang dikelola oleh negara, pihak swasta dan oleh rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan akan ekspor dan kebutuhan domestik, sebagian besar dipenuhi oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan selebihnya dipenuhi oleh perkebunan swasta dan perkebunan rakyat. Di Kabupaten Bandung luas perkebunan Teh sekitar 23.779,39 ha, yang terbagi atas perkebunan besar negara 63,7%, perkebunan swasta 27,2% dan perkebunan rakyat 9,1% (Dinas Pertanian Kabupaten Bandung:2005). Berikut Tabel luas lahan perkebunan Teh beserta status kepengelolaannya di Kabupaten Bandung :

Tabel 1.1
Luas Lahan Perkebunan Teh Beserta Status Kepengelolaannya di
Kabupaten Bandung Tahun 2005

No	Status Pengelola	Luas Lahan (ha)	Persentase (%)
1.	Perkebunan besar negara	14.511,63	63,7
2.	Perkebunan besar swasta	6.192,26	27,2
3.	Perkebunan rakyat	3.075,50	9,1
	Jumlah	23.779,39	100

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2005

Perkebunan besar negara (PTPN VIII) yang ada di Kabupaten Bandung tersebar pada beberapa kecamatan yakni Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasir Jambu, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Pangalengan dan Kecamatan Kertasari. Sedangkan perkebunan swasta terdapat di Kecamatan Pasir Jambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Cikalongwetan dan Kecamatan Pangalengan. Lokasi perkebunan Teh beserta nama kebunnya disajikan dalam Tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Nama Kebun Beserta Lokasi Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan
Besar Swasta di Kabupaten Bandung Tahun 2005

No	Perkebunan Besar Negara		Perkebunan Besar Swasta	
	Nama Kebun	Alamat Kebun	Nama Kebun	Alamat Kebun
1.	Sinumbra	Rancabali	Cibuni	Rancabali
2.	Rancabali	Rancabali	Nagarakanaan	Rancabali
3.	Rancabolang	Pasir Jambu	Dewata	Pasir Jambu
4.	Pangheotan	Cikalongwetan	Paranggong	Pasir Jambu
5.	Panglejar	Cikalongwetan	Patuahwatte	Pasir Jambu
6.	Montaya	Gununghalu	Nyalindung	Cikalongwetan
7.	Pasirmalang	Pangalengan	Lembang Dano	Cikalongwetan
8.	Kertamanah	Pangalengan	Kertasari	Pangalengan
9.	Malabar	Pangalengan	Cukul	Pangalengan
10.	Purbasari	Pangalengan	Alba	Pangalengan
11.	Talun Santosa	Kertasari	-	-
12.	Sedep	Kertasari	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2005

Perkebunan Pangheotan berdiri sejak tahun 1908 oleh Perusahaan Hindia Belanda dan sampai dengan periode tahun 1957 di bawah penguasaan H.I.L. Tiedeman dan van Kerchem berkedudukan di Bandung. Tahun 1958 dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan nama perusahaan PPN Baru, PNP dan pada tanggal 31 Juli 1971 dengan akte notaris HGS Loemban Tobing, SH berubah lagi menjadi perusahaan perseroan PTP XII yang berkedudukan di Bandung. Selanjutnya mulai 11 Maret 1996 PTP XII dilebur bersama PTP XI dan PTP XIII menjadi PTPN VIII (Selayang Pandang Perkebunan Pangheotan:2007).

Perkebunan Pangheotan sebagai salah satu perkebunan di bawah BUMN PTPN VIII (persero) terletak di Kabupaten Bandung dengan jarak ± 34 km dari Kota Bandung ke arah barat laut. Wilayah Perkebunan Pangheotan tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Cikalongwetan (Bagian Induk, Pangheotan I dan II), Kecamatan Parongpong (Bagian Sukawana) dan Kecamatan Cilengkrang (Bagian Bukittunggul). Wilayah kerja Perkebunan Pangheotan yang mengelola usaha pokok tanaman Teh dan kina terbagi dalam empat afdeling (kebun utama) dengan ketinggian 600-1750 m dpl. Perkebunan Pangheotan terhampar di daerah topografi berbukit pada kemiringan 10-85%, terletak di sebelah barat dan timur Gunung Burangrang, di sebelah barat daya Gunung Tangkuban Parahu dan di sebelah selatan Gunung Bukittunggul. Curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm per tahun dengan temperatur harian antara 17-26⁰C dan mayoritas jenis tanahnya tergolong tanah Andosol (Selayang Pandang Perkebunan Pangheotan:2007). Luas areal keseluruhannya adalah 1.749,67 ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Luas Areal Perkebunan Pangheotan

No	Jenis Peruntukan Areal	Luas Areal (ha)
1.	Tanaman menghasilkan	891,69
2.	Tanaman belum menghasilkan	520,94
3.	TTAD/TTI/Pesemaian	108,00
4.	Hutan tanaman industri, reboisasi	68,51
5.	Ex lancuran, lahan tidak produktif	90,56
6.	Dipakai pihak ketiga	0,63
7.	Emplasemen, jalan dan lain-lain	69,34
Jumlah		1.749,67

Sumber : Selayang Pandang Perkebunan Pangheotan, 2007

Berdasarkan data di atas, maka keberadaan Perkebunan Pangheotan akan menyerap banyak masyarakat sekitar sebagai karyawannya baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap mulai dari pemetik/panen, pemelihara, pengolah, teknisi, administrasi dan mandor. Dengan banyaknya karyawan yang bekerja pada perkebunan menjadi perhatian penulis, apakah ada korelasi antara karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap Perkebunan Pangheotan dilihat dari pendapatan dan pendidikannya yang menunjang pada kesejahteraan hidup dan bagaimana pula dengan karakteristiknya yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan daerah asalnya. Penulis tertarik untuk meneliti **“Karakteristik Kehidupan Sosial Ekonomi Karyawan Perkebunan Pangheotan Kabupaten Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Mengingat keterbatasan penulis, baik dari segi kemampuan, waktu dan biaya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah karakteristik kehidupan sosial ekonomi karyawan Perkebunan Pangheotan Kabupaten Bandung dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan daerah asal ?

2. Bagaimanakah klasifikasi tingkat kesejahteraan karyawan Perkebunan Pangheotan Kabupaten Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui karakteristik kehidupan sosial ekonomi karyawan Perkebunan Pangheotan Kabupaten Bandung dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan daerah asal.
2. Untuk mengetahui klasifikasi tingkat kesejahteraan karyawan Perkebunan Pangheotan Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Mudah-mudahan dengan penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya berupa teoritis saja tetapi ada tindak lanjut untuk selanjutnya.

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian terutama sub-sektor perkebunan.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi informasi yang faktual dan aktual mengenai karakteristik kehidupan sosial ekonomi karyawan Perkebunan Pangheotan Kabupaten Bandung baik untuk pihak-pihak terkait maupun bagi masyarakat luas.

E. Definisi Operasional

1. Karakteristik artinya ciri-ciri khusus; mempunyai sifat-sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999:445). Ciri-ciri khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ciri-ciri khusus sosial ekonomi masyarakat Perkebunan Pangheotan Kabupaten Bandung.

2. Kehidupan artinya cara (keadaan, hal) hidup (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:400). Cara atau keadaan hidup yang dimaksud pada penelitian ini adalah keadaan hidup sosial ekonomi masyarakat Perkebunan Pangheotan Kabupaten Bandung.

3. Sosial Ekonomi

Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:1085). Ekonomi artinya pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:287). Sedangkan pengertian ekonomi menurut Kamil Pasya (2002:130) adalah “ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia untuk mencapai kemakmuran serta gejala-gejalanya dan hubungan timbal balik dari usaha tersebut”.

Kehidupan sosial ekonomi yang dimaksud pada penelitian ini adalah yang berkenaan dengan masyarakat terutama dalam kaitannya untuk mencapai kemakmuran dengan cara memanfaatkan uang, tenaga, waktu dan sebagainya.

4. Karyawan

Karyawan artinya orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dsb) dengan mendapat gaji (upah); Pegawai; Pekerja. 1). Karyawan

Tetap adalah pegawai yang bekerja disuatu badan (perusahaan, dsb) secara tetap berdasarkan surat keputusan. 2) Karyawan Tidak Tetap adalah pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak kerja (dalam waktu tertentu); Pegawai harian; Karyawan lepas.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis simpulkan bahwa karyawan tetap dan tidak tetap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karyawan tetap dan tidak tetap adalah orang atau pegawai atau pekerja yang bekerja pada perusahaan yaitu PTPN VIII Perkebunan Pangheotan dengan mendapat gaji (upah) menurut golongan sesuai dengan skala gaji yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PTPN VIII dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) PTPN VIII.

5. Perkebunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:521), perkebunan merupakan :

1). Hal berkebun, 2). Perusahaan yang mengusahakan kebun, 3). Tanah yang dijadikan kebun. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang mengusahakan kebun dengan tanaman Teh dan kina sebagai komoditasnya yakni perkebunan besar negara (PTPN VIII) Perkebunan Pangheotan.

6. Pangheotan

Pangheotan adalah salah satu perkebunan di bawah BUMN PTPN VIII (persero) terletak di Kabupaten Bandung dengan jarak ±34 km dari Kota Bandung ke arah barat laut. Wilayah Perkebunan Pangheotan tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Cikalongwetan (Afdeling Pangheotan I dan II), Kecamatan Parongpong (Afdeling Sukawana) dan Kecamatan Cilengkrang (Afdeling Bukittunggul). Wilayah kerja Perkebunan Pangheotan yang mengelola usaha pokok

tanaman Teh dan kina terbagi dalam empat afdeling (kebun utama) dengan ketinggian 600-1750 m dpl. Perkebunan Pangheotan terhampar di daerah topografi berbukit pada kemiringan 10-85%, terletak di sebelah barat dan timur Gunung Burangrang, di sebelah barat daya Gunung Tangkuban Parahu dan di sebelah selatan Gunung Bukittunggul. Curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm per tahun dengan temperatur harian antara 17^o-26^oC dan mayoritas jenis tanahnya tergolong tanah Andosol. Jadi karakteristik kehidupan sosial ekonomi masyarakat Perkebunan Pangheotan Kabupaten Bandung dalam penelitian ini berupa penggambaran karakteristik kehidupan masyarakat Perkebunan Pangheotan Kabupaten Bandung. Selain itu, diteliti pula klasifikasi tingkat kesejahteraannya dengan cara membandingkan fakta yang ada dilapangan dengan standar atau indikator kesejahteraan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

